

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berorientasi untuk mewujudkan tatanan seluruh perikehidupan masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Kekayaan alam yang diciptakan Tuhan yang meliputi bumi, air dan luar angkasa serta seluruh kekayaan alam terkandung di dalamnya mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting dan agar dapat dinikmati oleh setiap masyarakat umum untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menyelenggarakan pembangunan nasional dari segala aspek bidang secara berencana menyeluruh dan merata.

Kabupaten Klaten hampir seluruh tanah yang ada di wilayah tersebut telah dimanfaatkan serta dibudidayakan baik oleh penduduk setempat, badan hukum maupun pemerintah atau swasta. Adanya kemajuan pembangunan, maka tanah-tanah di Kabupaten Klaten tersebut telah dialihfungsikan penggunaannya. Tanah-tanah yang mestinya berfungsi sebagai lahan pertanian telah didirikan di atasnya berbagai macam bangunan dari berbagai keperluan

Akibat alih fungsi tersebut dia atas tentu saja dapat muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan atau penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Klaten, yakni :

1. Adanya tumpang tindih peruntukan tanah, kegiatan antar sector, antara sector dengan masyarakat.
2. Perubahan prnggunaan tanah yang tidak terkendali.
3. Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan potensi atau kemampuan ada pada tanahnya.
4. Adanya kerusakan sejumlah yang menyebabkan kemerosotan produktifitas tanah dan terganggunya keserasian, keselarasan serta keseimbangan lingkungan hidup pada umumnya.

Sesungguhnya pengguna atau pemanfaat tanah berkaitan erat dengan hak-hak yang melekat pada tanah dan oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban mengatur dan mengelola penggunaan dan pemanfaatan atas tanah tersebut.

Tanah merupakan unsure yang utama dan sangat penting yang perlu dijaga kelestariannya oleh manusia. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan hasil tanah. Perkembangan jaman yang semakin maju dan jumlah manusia yang semakin bertambah, sehingga kebutuhan akan tanah menjadi meningkat.

Klaten merupakan salah satu lumbung padi daerah Jawa Tengah. Hal

1. Visi Kabupaten Klaten:

Terwujudnya Klaten yang Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo.

2. Misi Kabupaten Klaten:

- a. **Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (wareg, wasis, wisma dan wutuh).**
- b. **Mengupayakan rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan materiil dan spiritual dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.**
- c. **Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghargaan serta aktualisasi diri dalam pembangunan.**
- d. **Menumbuhkan kehidupan perekonomian yang dinamis dengan menumbuhkan kehidupan perekonomian rakyat yang berbasis sumber daya lokal, menjaga kelestarian hidup, serta mengurangi kemiskinan.**
- e. **Penerapan pengarusutamaan gender dalam berbagai fungsi Pemerintahan.**
- f. **Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pembangunan.**
- g. **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya yang memadai.**

Visi dan misi kabupaten Klaten tersebut sesuai dengan letak geografis Kabupaten Klaten sangat agraris. Secara geografis Kabupaten Klaten terletak diantara 110o30'-110o45' Bujur Timur dan 7o30'-7o45' Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 665,56 km². Di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Boyolali.

Menurut topografi kabupaten Klaten terletak diantara gunung Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter diatas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan. Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan, dan berada dalam ketinggian yang bervariasi, yaitu 9,72% terletak di ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut. 77,52% terletak di ketinggian 100-500 meter dari permukaan air laut dan 12,76% terletak di ketinggian 500-1000 meter dari permukaan air laut.

Akan tetapi dengan perkembangan pertumbuhan manusia yang sangat tinggi di kabupaten Klaten, membuat banyak masyarakat membuat permukiman. Konsekuensi logisnya adalah banyak lahan pertanian yang dijadikan permukiman oleh masyarakat. Efek negatif hal ini adalah lahan produktif pertanian semakin sempit dan kabupaten Klaten sebagai lumbung

menganalisis pengalihfungsian tanah pertanian menjadi non pertanian untuk permukiman dalam perpektif hukum di Kabupaten Klaten

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur pengalihfungsian tanah pertanian menjadi permukiman di Kabupaten Klaten?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi alih fungsi tanah pertanian menjadi permukiman di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pengalihfungsian tanah pertanian menjadi permukiman di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi alih fungsi tanah pertanian menjadi permukiman di Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca untuk mengetahui syarat

... .. untuk permukiman

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan. Hal ini dikarenakan dalam penelitian in data dan informasinya diperoleh dari kasus dari kabupaten Klaten yang selanjutnya dikorelasikan dengan sumber pustaka (bacaan) baik berupa buku-buku, koran, majalah, undang-undan dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Teknik dan Alat Pengumpul Data

a. Studi Kepustakaan

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yaitu yang berhubungan dengan pengalihfungsian tanah pertanian menjadi non pertanian untuk permukiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya buku – buku ilmu pengetahuan, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini memberikan petunjuk dan penjas bagi

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini digunakan untuk memperoleh kasus sebagai subyek penelitian.

3. Analisis Data

Data yang penulis dapatkan baik hasil penelitian kepustakaan, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *yuridis kualitatif* yaitu menjelaskan atau menerangkan segala sesuatu yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian kepustakaan sehingga